

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR RI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
SENIN, 18 OKTOBER 2010

Tahun Sidang : 2010-2011
Masa Persidangan : I
Rapat Ke : --
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan : DPRD Kota Mojokerto
Hari/Tanggal : Senin, 18 Oktober 2010
Pukul : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat : Ganjar Pranowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat : Drs Riyadi Santoso, M.Si/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara : Audiensi Terkait Rekrutmen CPNS dan Permasalahan
Pertanahan di Kota Mojokerto
Kehadiran : 1 Anggota Komisi II DPR RI
12 Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto

HADIR :

◆ Ganjar Pranowo

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto dibuka pukul 13.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Ganjar Pranowo/F-PDI Perjuangan.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. DPRD Kota Mojokerto menyampaikan kepada Komisi II DPR RI bahwa berkaitan dengan akan dibukanya Rumah Sakit Tipe B di Mojokerto maka pada tahun 2011 mendatang Kota Mojokerto membutuhkan CPNS yang profesional dimana proses rekrutmen CPNS di Kota Mojokerto akan dilaksanakan pada 12 November 2010 mendatang. Terkait hal ini DPRD Kota Mojokerto menilai bahwa alokasi jumlah CPNS yang sudah disetujui oleh Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), sebesar 122 CPNS untuk Kota Mojokerto mendatang dirasa masih kurang dan perlu ditambah. DPRD Kota Mojokerto berpendapat bahwa alokasi jumlah CPNS yang dibutuhkan oleh Kota Mojokerto sebesar 410 CPNS. Alokasi jumlah 122 CPNS untuk Kota Mojokerto tersebut menurut DPRD Kota Mojokerto belum menyentuh kebutuhan Rumah Sakit yang akan selesai pada akhir tahun ini, dengan demikian DPRD Kota Mojokerto berharap pada proses rekrutmen CPNS mendatang pemerintah pusat perlu mempertimbangkan tenaga-tenaga CPNS yang profesional yang tentunya sangat dibutuhkan bagi Rumah Sakit ini nantinya.
2. Selain masalah penambahan alokasi jumlah CPNS untuk Kota Mojokerto, DPRD Kota Mojokerto juga menyampaikan kepada Komisi II DPR RI terkait dengan banyaknya masalah sertifikasi “hijau” di daerah Gubeng, yang menurut DPRD Kota Mojokerto pengertian daripada sertifikasi hijau adalah belum punya/belum memiliki sertifikat yang sah dan DPRD Kota Mojokerto meminta petunjuk kepada Komisi II DPR RI agar tanah-tanah di daerah Gubeng tersebut bisa di beri sertifikat.
3. Terkait dengan dua hal permasalahan yang telah disampaikan oleh DPRD Kota Mojokerto tersebut, pertama Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa DPRD Kota Mojokerto perlu membuat rasionalitas yang konkrit dan jelas terlebih dahulu terkait alokasi kebutuhan CPNS yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit tersebut mengingat seringkali pada nantinya banyak yang akan titip agar bisa masuk menjadi CPNS dan hal ini kiranya harus dihindari. Teknisnya DPRD Kota Mojokerto menulis surat resmi kepada Menpan dengan tembusan ke Komisi II DPR RI terkait penambahan CPNS di Kota Mojokerto khususnya terkait dengan penyesuaian jumlah kebutuhan tenaga CPNS yang profesional bagi rumah sakit tersebut. Yang kedua terkait dengan belum dimilikinya sertifikat untuk tanah-tanah di daerah Gubeng, Komisi II DPR RI meminta DPRD Kota Mojokerto untuk menanyakan dan mengkonfirmasi kembali masalah tersebut ke BPN, seperti siapakah pemilik sebenarnya dari tanah-tanah yang belum ada sertifikatnya tersebut, apakah milik negara atau milik warga ? dan apabila milik warga dan terbukti belum ada sertifikatnya, DPRD Kota Mojokerto perlu menyampaikan hal tersebut ke BPN, agar dibuatkan sertifikat.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Setelah Pimpinan Komisi II DPR RI (Ganjar Pranowo) menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto menyampaikan pendapat/pandangannya serta aspirasi, ada beberapa catatan sebagai berikut :

Komisi II DPR RI mengapresiasi masukan/aspirasi yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto. Komisi II DPR RI menyampaikan

bahwa untuk alokasi penambahan CPNS di Kota Mojokerto perlu dibuat rasionalitas terlebih dahulu yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit, dan dalam hal ini Komisi II DPR RI menghimbau agar dilaksanakan seadil-adilnya. Kemudian terkait dengan masalah tanah di Gubeng yang belum memiliki sertifikat perlu segera ditanyakan ke BPN. Masalah-masalah DPRD Kota Mojokerto tersebut akan dijadikan sebagai bahan masukan bagi Komisi II DPR RI.

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 18 Oktober 2010
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
WAKIL KETUA,

t.t.d.

GANJAR PRANOWO
A-365